



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Beakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR	8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
B. Sumber Daya	13
C. Kinerja Pelayanan	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR	20
A. Permasalahan	20
B. Telaah Renstra Kementerian Diskominfo	21
C. Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
A. Tujuan dan Sasaran	40
B. Cascading Kinerja Diskominfo	42
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
A. Strategi	47
B. Kebijakan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49
B. Program Komunikasi dan Informasi	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	68
A. Indikator Kinerja Utama Diskominfo	68
B. Indikator Kator Kinerja Kunci	70
BAB VIII PENUTUP	78
A. Pedoman Transisi	78
B. Kaidah Pelaksanaan	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	13
Tabel 2.2	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kondisi Tahun 2023	14
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022	17
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan dan akar masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	20
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	25
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran dan Renstra Badan Statistik beserta faktor penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya	30
Tabel 4.1	Tujuan, sasaran serta target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	40
Tabel 4.2	Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026	43
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	48
Tabel 6.1	Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	51
Tabel 7.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.....	70
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	71
Tabel 7.3	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Permendagri 18/ 2020)...	73
Tabel 7.4	Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Permendagri 18/ 2020).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dengan visi adalah :

"Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar" akan berakhir masa berlakunya di tahun 2023, telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 sehingga Daerah memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penggantinya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

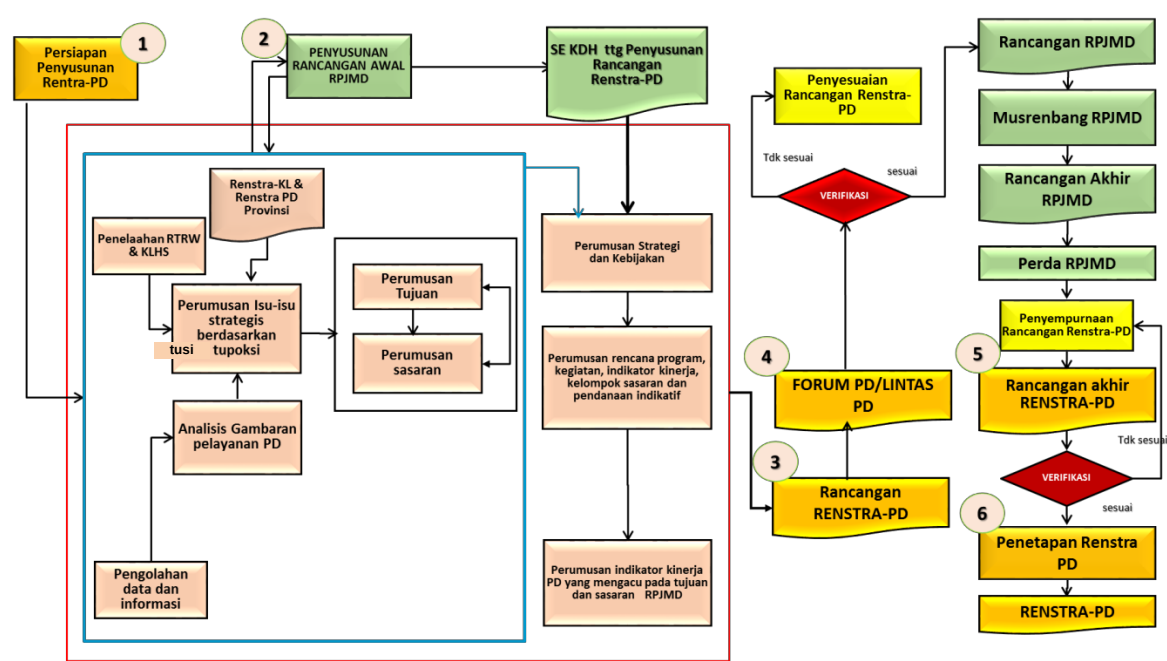
Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, meliputi sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 harus berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Perda dan Perbup terkait SOTK OPD.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 mengacu pada RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan Renstra juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alur sebagai berikut:



Gambar 1
Bagian Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Memberikan gambaran umum kondisi, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta;
4. Menjadi acuan bagi kepala Diskominfo dalam menyusun perubahan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 3 Tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut;

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tiga tahun kedepan;
2. Agar strategi, arah kebijakan serta program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan / permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Agar terwujud keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi dan program Kepala dan wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, telaahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi

1. Tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
2. Cascading kinerja Diskominfo

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan :

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target dan Pagu Anggaran Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2024-2026

BAB VIII. PENUTUP

BAB. II GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

1. Struktur Organisasi.

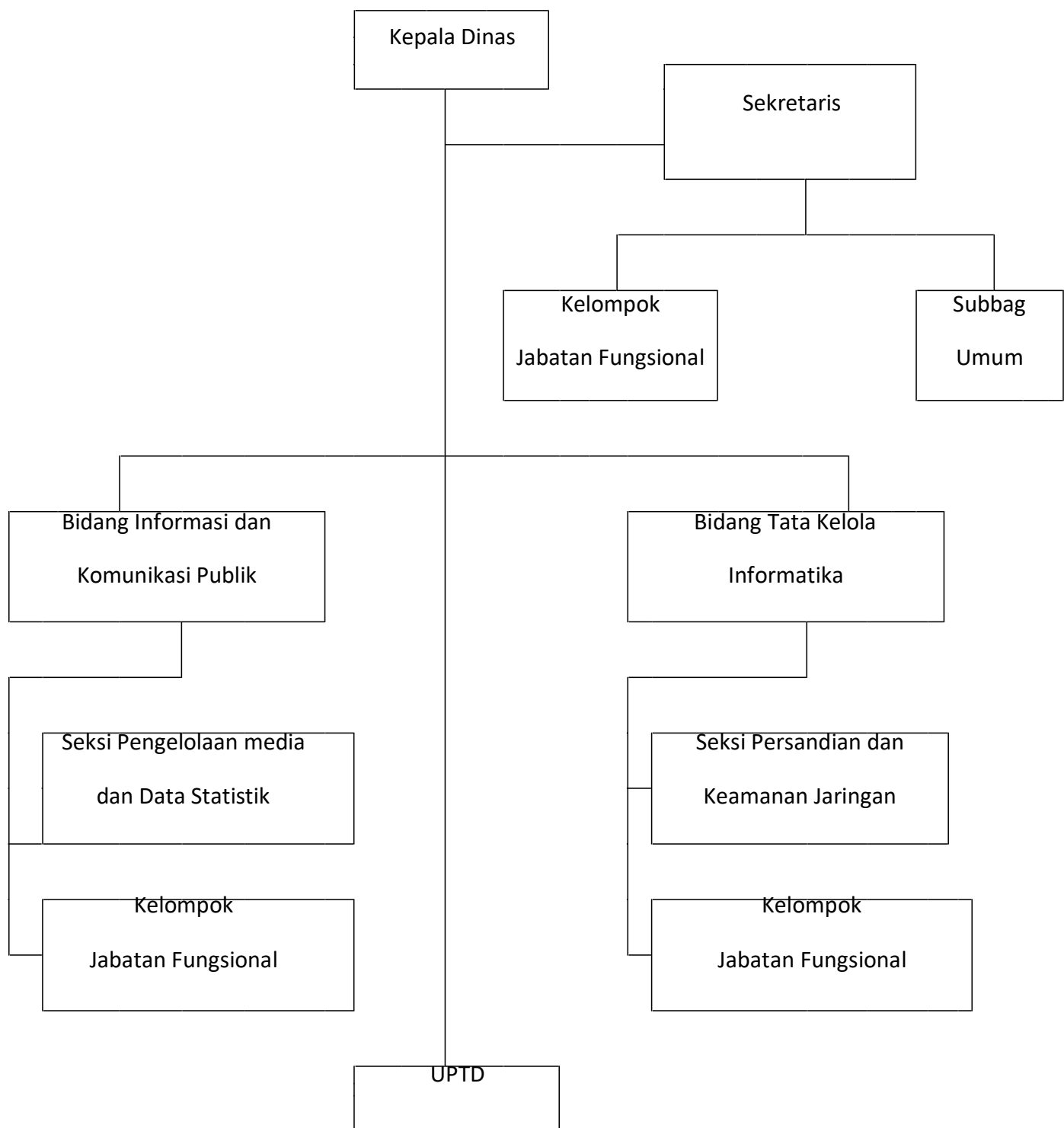
Diskominfo Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Kelompok Jabfung.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi ;
 - 1) Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik;
 - 2) Kelompok Jabfung.
- d. Bidang Tata Kelola Informatika membawahi ;
 - 1) Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan;
 - 2) Kelompok Jabfung.

Struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar

Sumber: Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Karanganyar, 2021

2. Uraian Tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfo Kabupaten Karanganyar, maka Diskominfo Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Diskominfo mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan informasi, bidang persandian bidang komunikasi dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Diskominfo; dan
- e. pelaksanaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris.

Sekretaris Diskominfo mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan; .
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Umum.
- Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
- melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
 - c. pengelolaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik.
- Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : melaksanakan penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan media dan data statistik.

6. Kepala Bidang Tata Kelola Informatika.

Kepala Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan *e-Government*;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan *e-Government*,
- c. pengelolaan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan *e-Government*,
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan *e-Government*, dan
- e. pelaksanaan dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan.

Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : melaksanakan penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan jaringan.

8. UPTD.

UPTD mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : melaksanakan, tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Seksi/Subbagian dan/ atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

B. Sumber Daya.

1. Sumber Daya Manusia.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Diskominfo Kabupaten Karanganyar keadaan per Agustus 2022 sejumlah 53 Orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2/ Magister	2	3	1	-	6
2.	S1/ Sarjana	10	9	6	3	28
3.	D III	4	3	1	1	9
4.	D II	-	-	-	1	1
5.	SMA/ Sederajat	3	3	2	-	8
6.	SMP/ Sederajat	1	-	-	-	1
	Jumlah Total	20	18	10	5	53

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 11,32% (6 Orang); S1 sebesar 52,83% (28Orang); D III sebesar 16,98% (9 Orang), D II sebesar 1,88% (1Orang), SMA sebesar 15,09% (8 Orang); SMP sebesar 1,88% (1 Orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas KomunikasidanInformatika Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 5 Orang, Golongan III sebanyak 24Orang, Golongan II sebanyak 8Orang. Golongan I sebanyak 1 Orang dan Non Golongan sebanyak 15 Orang, Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	3	5

2.	Golongan III	12	12	24
3.	Golongan II	5	3	8
4.	Golongan I	1	-	1
5.	Non Golongan	10	5	15
	Jumlah	30	23	53

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2022

2. Sarana dan Prasarana (Asset).

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Diskominfo keadaan bulan Desember 2022 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022 (per 31 Desember 2022)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	5	2	7
2	Kendaraan roda 2	9	-	9
3	AC Split	10	-	10
4	Audio Amplifier	1	-	1
5	Camera Video	8	-	8
6	Gambar Presiden/Wapres	1	-	1
7	Filling Besi/Meta	8	-	8
8	Handy Cam	1	2	3
9	Kipas Angin	-	1	1
10	Kursi Putar	11	-	11
11	Kursi Lipat	81	-	81
12	Kursi Tamu	2	-	2
13	Lambang Negara (Garuda)	2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
14	Laptop	19	-	19
15	Lensa Kamera	1	-	1
16	Meja Kerja Pegawai	25	-	25
17	Meja Kerja Eselon IV	3	-	3
18	Modem	1	-	1
19	Note Book	8	-	8
20	PC Unit/Komputer PC	53	-	53
21	Printer	13	-	13
22	Scanner	1	-	1
23	Sound System	1	-	1
24	Tangga Aluminium	1	-	1
25	Televisi	5	-	5
26	UPS	9	-	9
27	White Board	1	-	1
28	Wireless	21	-	21
29	Stabilisator	1	-	1
30	Monitor	9	-	9
31	AC Window	1	-	1
32	Loudspeaker	2	-	2
33	Microphone	10	-	10
34	Switcher/Menara Antena lainnya	5	-	5
35	Peralatan Pemancar VHF/FM lainnya	6	-	6
36	Microphone Table Stand	3		3
37	Microphone/Wireless Mic	1	-	1
38	Off Air TV Monitor	4	-	4
39	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
40	Kursi Besi/Metal	10	-	10

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
41	Meja Bundar	2	-	2
42	Meja ½ Biro	10	-	10
43	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	-	3
44	Kursi Tamu	2	-	2
45	Perlatan Studio Audio Linnya	4	-	4
46	Power Amplifier	2	-	2
47	Lensa Kamera	1	-	1
48	Meja Komputer	10	-	10
49	Uninterruptible Power Suply (UPS)	8	-	8
50	Komputer Unit Lainnya	1	-	1
51	Netware Interface External	1	-	1
52	TV Video Wall 55"	6	-	6
53	Ubiquity Unity AC mesh	1	-	1
54	Termogan	1	-	1
	Jumlah	407	5	412

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas, kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik, akan tetapi kondisi gedung kantor yang harus mendapatkan perhatian karena kondisinya kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Kinerja Pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu:

- 1) Informasi dan Komunikasi Publik serta
- 2) Aplikasi Informatika.

Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP);

- 2) Persentase KIM aktif;
- 3) Persentase media massa yang bekerjasama dengan Pemkab;
- 4) Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik;
- 5) Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi.

Tujuan pembangunan website Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintahan daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet. Website merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pembangunan website pemerintah yang terintegrasi dan selalu update merupakan hal yang sangat penting.

Kinerja Diskominfo berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Diskominfo Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)	%	61,90	73,81	78,57	99,6	100
2.	Persentase KIM aktif	%	35,29	59,00	60,86	83,30	83,30
3.	Persentase media massa yang bekerjasama dengan Pemkab (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %	%	55,00	54,55	62	108,33	100
4.	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	40,00	50,00	55	100	63
5.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	25,00	30,00	35	102,5	25

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Desember 2022

URUSAN BIDANG STATISTIK.

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Urusan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar diukur melalui indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral. Capaian indikator prosentase ketersediaan data statistik sektoral dari tahun 2018-2022 sangat baik yaitu sudah mencapai 100% tiap tahun. Perpindahan data (obyek) dari kabupaten ke provinsi seperti data jumlah siswa SMA/SMK, jumlah industri besar, jumlah lulusan kuliah, dll, belum optimal. belum adanya portal data menyebabkan belum optimalnya fasilitasi data statistik sektoral. Selama tahun 2018-2022 tersebut jumlah aparatur yang melaksanakan Urusan Statistik sejumlah empat orang yang terdiri dari dua orang ASN dan dua orang Tenaga Harian Lepas. Dengan keterbatasan jumlah SDM pelaksana tersebut, data statistik sektoral yang dihasilkan diantaranya PDRB, Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indek Harga Konsumen dan lain-lain, yang semuanya terdapat dalam website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

BIDANG PERSANDIAN.

Persandian; Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui kinerja urusan persandian dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah memiliki capaian yang baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,0% meningkat menjadi 10,00% di tahun 2019 dan menjadi 21,0% pada tahun 2020 dan capaian optimal sebesar 100% di tahun 2021 dan tahun 2022. Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar yang telah

menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sejumlah 43 Perangkat Daerah atau 100,00% dari total Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO

KABUPATEN KARANGANYAR

A. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut antara lain sebagai berikut :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karanganyar di tahun 2022 sudah cukup baik meskipun belum mencapai target yaitu 3,32 dengan kategori Baik. Perlunya upaya untuk menaikkan nilai SPBE sehingga menjadi kategori Memuaskan.
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
 - a. Belum optimalnya ketersediaan dan fasilitas data statistik sektoral (satu data Indonesia)
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam kegiatan pemerintahan.

Pemetaan Permasalahan dan akar masalah
Diskominfo Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM TIK dan persandian	Kapasitas SDM TIK dan persandian yang masih kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart
		Belum semua aplikasi di perangkat daerah saling terintegrasi	Lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan e-government
		Kurangnya infrastruktur jaringan dan peta lebar (bandwith) serta perangkat keras dan lunak	
		Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK	Belum optimalnya KIP
		Belum optimalnya kapasitas lembaga persandian	Terbatasnya SDM dan lembaga pengelola sandi
		Belum optimalnya tata kelola Smart City	Ketersediaan masterplan Smart City belum optimal

Sumber: Hasil Anilisis, 2023

B. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a) Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- b) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- c) Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- d) Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- e) Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- f) Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- g) Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- h) Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- i) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- j) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan dan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, dengan strategi:
 - 1) Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring;
 - 2) Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota;
 - 3) Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO;
 - 4) Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri;

- 5) Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional;
 - 6) Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan;
 - 7) Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional;
 - 8) Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK;
 - 9) Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
 - 10) Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi.
- b. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan strategi:
- 1) Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah;
 - 2) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
 - 3) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
 - 4) Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.
- c. Mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif dengan strategi:
- 1) Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien;
 - 2) Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur,

Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berikut permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong dapat di lihat dalam tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan;	Kurangnya pemanfaatan TIK oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebutuhan akses telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi	Perkembangan media sosial yang semakin pesat
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai <i>leading sektor</i> dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;	1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi di seluruh wilayah; 2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;	Investasi teknologi dan informasi yang mahal	Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;	Belum tersedianya regulator pendukung pelaksanaan TIK	Ketidaksesuaian antara regulasi telekomunikasi daerah dengan kondisi faktual	• Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; • Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				menerus oleh Pemerintah Kabupaten
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Belum optimalnya Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah; 2. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga tidak diupdate. 3. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal karena belum semua website di masing-masing OPD terintegrasi.	• Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang informatika (TI)	• Perangkat TIK sudah mendukung • Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update

2. Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Visi Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Menjadi Institut Terpercaya Dalam Menjaga Keamanan Siber Dan Sandi Negara Dengan Mensinergikan Berbagai Pemangku Kepentingan Untuk Ikut Serta Mewujudkan Keamanan Nasional Dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Sedangkan misinya adalah :

- a. Menjadi keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif;
- c. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;
- d. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman, insiden dan/atau serangan siber dan sandi;
- e. Membangun budaya keamanan siber dan sandi sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia;
- f. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung visi tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran Badan Siber dan Sandi Negara adalah:

- a. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian;
- b. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.

3. Renstra Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2020 – 2024 Visinya adalah :

“Penyedia data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti BPS berperan dalam penyediaan data Statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Misi BPS adalah

1. Menyediakan statistik berkualitas yang standar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun NDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesinalisme, integritas dan amanah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Berikut permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Badan Pusat Statistik yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong (lihat Tabel 3.3)

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>); c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien.	1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah; 2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah;	• Pengumpulan data yang sulit; • Pengumpulan data yang seringkali terlambat	• Komitme untuk menyediakan data yang selalu up date;
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>).	Data tidak ter-up date tepat waktu	• Pengumpulan data yang sulit; • Pengumpulan data yang seringkali terlambat	• Permintaan data yang selalu up date • Komitme untuk menyediakan data yang selalu up date;
3	a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.	Belum teritegrasinya sistem data dan statistik	Data dan statistik belum saling terintegrasi	• Kemajuan TI dalam mendukung penyediaan data yang terintegrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.	Kurangnya sumber daya pengelola statistik	• Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang pengelolaan statistik	• Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update; • Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan

4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mendukung visi
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
adalah :

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera

“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Keterkaitan fungsi Diskominfo dengan misi Jawa Tengah
2018-2023 adalah Misi 2 :

Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan
koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja
pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program
pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah
Jawa Tengah antara lain :

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka daya saing daerah;
 - b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;
 - c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
 - d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 pasal 14 (ayat 5) bahwa Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (ayat 6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Maka dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika. RTRW Kabupaten Karanganyar 2013-2032 bertujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Diskominfo Kabupaten Karanganyar lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 9 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

- a. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
- b. Pembangunan prasarana utama serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di Kabupaten dan antar wilayah Kabupaten dengan wilayah lain;
- c. Pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
- d. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
- e. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;

- f. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
- g. Pengurangan kesenjangan wilayah bagian selatan dan timur dengan wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan potensi jasa ekosistem yang tersedia;
- h. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan;
- i. Pengoptimalkan kegiatan Intanpari melalui penetapan kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan RenstraDiskominfo Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Sebagaimana yang termuat pada Perda RTRW Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2019 (pasal 14), bahwa rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi :

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan sarana pendukungnya meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada Kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan Kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. Penyediaan sarana warung telepon dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau Kawasan pusat kegiatan Masyarakat.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan nirkabel yang diarahkan pada upaya

pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi Ruang.

- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi daerah disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Diskominfo dilakukan dengan

menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* dan kualitas pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa;
3. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam aplikasi open data sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga PPID belum berjalan maksimal.
6. Belum optimalnya tata kelola Smart City.

Isu Strategis.

a. Isu Strategis Nasional.

Berdasarkan misi dan arahan Presiden, pemerintah pusat menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari masing-masing agenda pembangunan tersebut, beberapa isu strategis yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 - a. Keberlanjutan sumber daya alam
 - b. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
 - c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 - a. Belum tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang - undangan sektoral lainnya.
 - c. Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan.
 - d. Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional.
 - e. Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - c. Pemenuhan layanan dasar
 - d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - e. Pengentasan kemiskinan
 - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 Isu strategis terkait agenda pembangunan ini terbagi kembali ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :
 - a. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa.
 - b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia.
 - c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti.
 - d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama.

- e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan.
- f. Belum optimalnya peran keluarga, khususnya dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa.
- g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Infrastruktur ekonomi
 - c. Infrastruktur perkotaan
 - d. Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Transformasi digital
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
 - a. Konsolidasi demokrasi
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - c. Penegakan hukum nasional
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional dinamika ancaman pertahanan
 - f. Dukungan industri pertahanan belum optimal
 - g. Dinamika ancaman siber
 - h. Indonesia menjadi negara tujuan peredaran gelap narkoba
 - i. Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan
 - j. Rendahnya rasa aman di lingkungan masyarakat
 - k. Tingginya angka kejahatan dan pelanggaran hukum di laut
 - l. Sarana penyebaran paham radikal semakin beragam
- b. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

c. Isu Strategis Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi JawaTengah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Daya Saing Ekonomi
4. Reformasi Birokrasi

Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu :

- a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan
 - b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*)
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah
 - d. Inovasi Daerah
 - e. Pemerintah yang Kolaboratif
 - f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan
 - g. Isu Kualitas Pelayanan Publik
 - h. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN
5. Daerah Rawan Bencana

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah : Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan, sasaran serta target kinerja tahun 2024-2026
Dinas Komunikasi Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Pada Tahun		
							2024	2025	2026
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			Hasil penilaian dari Kemenpan atas IRB Kabupaten	Indeks	64	65	67	70
				Kategori indeks SPBE 4,2 - 5,0 Memuaskan 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 2,6 - < 3,5 Baik 1,8 - < 2,6 Cukup < 1,8 Kurang	Indeks	3,5	3,55	3,6	3,7
		Tingkat Keamanan Informasi Publik	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area	%	62	63	63	64	65
		Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD di kali 100%	%	100	100	100	100	100
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Diskominfo Kab.Kra	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Inspektorat	Skor	72	72,5	73	73,5

B. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level uni/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading disusun sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Adapun Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Output)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (Output)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026						2021							2024	2025	2026
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan tata peerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	65	67	70															
		Meningkatkan tata keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistikdan pemanfaatan persandian	Indeks SPBE	Kategori Indeks SPBE 4,2-5,0 memuaskan 3,5-<4,2 sangat Baik 2,6-<3,5 baik 1,8-<2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,55	3,60	3,70	Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika	Terkelolanya aplikasi informatika	Aplikasi dan jaringan intra pemerintah daerah berjalan dengan baik						Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggara nya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sistem jaringan intra pemerintah daerah dapat digunakan dan berjalan dengan baik				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Output)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (Output)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026						2021							2024	2025	2026
																	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/ kota berjalan dengan baik				
																		Terkelolanya Pusat Data Pemerintah Daerah	Pusat Data berjalan dengan baik				
																		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Output)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (Output)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026						2021									
																	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi				
																	Terselenggaranya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem penghubung layanan pemerintah berjalan dengan baik					
																	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Tersusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen				
																	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan						

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Output)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (Output)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
						2024	2025	2026						2021									
																	komunikasi Pemerintah Daerah						
																	Terkelolanya Government Information Chief (GCIO)						
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Persandian untuk pengamanan informasi berjalan dengan baik						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik dan non elektronik					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian.

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK, penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan, komunikasi, informasi, statistik dan persandian	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi; meningkatkan kapasitas kelembagaan persandian	Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus pada melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan :

1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/Kota

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKAT OR SASARA N OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEG IATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatk an tata pemerintaha n yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi																				
		Meningkatk an keterbukaa n informasi publik	Indeks SPBE	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Indeks SPBE	Kategori Indeks SPE 4,2 - 5,0 Memuaskan 3,5 - < 4,2 Sangat baik 2,6 - < 3,5 Baik 1,8 - 2,6 Cukup < 1,8 kurang	Indeks	3,55		3,6		3,7		3,7			
				2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
				2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Presentase indikator OPD (IKU da IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi	Persentase	65	4.351.704.700	67	4.386.875.650	70	4.518.483.513	70	13.257.063.863	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

										jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%												
				2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	61.894.700	100	63.911.700	100	64.500.700	100	190.307.100	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	30	50.193.000	35	51.000.000	40	51.500.000	40	152.693.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	30	11.701.700	35	12.911.700	40	13.000.700	40	37.614.100	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen adminstrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	3.729.824.658	100	3.754.125.658	100	3.876.637.171	100	11.360.587.487	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Jumlah Pegawai dan tunungan ASN	Bulan	12	3.568.400.244	12	3.591.361.244	12	3.711.483.757	12	10.871.245.245	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	120.760.000	12	121.100.000	12	122.430.000	12	364.290.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Sem esteran	Jumlah buku laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Sem esteran	Buku	125	40.664.414	135	41.664.414	140	42.723.414	140	125.052.242	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	246.585.342	100	252.338.292	100	257.845.642	100	756.769.276	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya ruang kerja yang nyaman	Bulan	12	6.007.000	12	6.007.000	12	7.007.000	12	19.021.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Printer dan AC	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	5	16.000.000	6	17.500.000	7	18.000.000	7	51.500.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	34.182.842	12	35.182.842	12	36.182.840	12	105.546.526	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.500.000	12	78.500.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	24.700.000	12	25.900.000	12	26.400.000	12	77.000.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	140.695.500	12	141.750.450	12	142.755.800	12	425.201.750	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika	jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	30.400.000	100	31.000.000	100	32.500.000	100	93.900.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	4.800.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	15.300.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	25.600.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	78.600.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	283.000.000	100	285.500.000	100	287.000.000	100	855.500.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.07	09	Pengadaan kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya dokumen pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan	Dokumen	12	125.000.000	12	126.000.000	12	126.500.000	12	377.500.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan, servis kendaraan dinas, BBM,Oli	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Bulan	12	158.000.000	12	159.500.000	12	160.500.000	12	478.000.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			%	100	2.927.740.000	100	3.163.439.000	100	4.547.462.000	100	10.638.641.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	296.032.000	1	332.159.000	1	385.103.000	1	1.013.294.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	282.070.000	1	295.506.000	1	355.681.000	1	933.257.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	a. Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	347.093.000	1	357.099.000	1	575.093.000	1	1.279.285.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										b. Terbayarnya pulsa admin 12 bulan	pulsa admin medsos	bulan	12		12		12		12		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	354.260.000	1	385.290.000	1	475.260.000	1	1.214.810.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	293.530.000	1	350.560.000	1	535.530.000	1	1.179.620.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	kegiatan	50	304.455.000	55	310.485.000	60	530.455.000	60	1.145.395.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	330.000.000	1	340.000.000	1	650.000.000	1	1.320.000.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	%	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	a. Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasi kan informasi program atau kebijakan	Jumlah doumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasi kan informasi program atau kebijakan	Dokumen	1	420.300.000	1	467.340.000	1	565.340.000	1	1.452.980.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

										b. Terlaksananya Diseminasi informasi melalui kegiatan Rembug Warga	Diseminasi informasi kebijakan pemkab melalui media pertunjukan rakyat (guyon maton)	kegiatan	2		3		4		4		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										c. Terlaksananya pemberdayaan KIM	pelatihan, monitoring evaluasi	kelompok	25		28		31		31			
										d. Terlaksananya forum komunikasi kehumasan pemda	kegiatan sinkronisasi kehumasan pemda (lingkup OPD dan kecamatan)	kegiatan	2		2		3		3		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1	300.000.000	1	325.000.000	1	475.000.000	1	1.100.000.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	02				a. Hibah Operasional LPPL Swiba	Hibah Ops LPPL Swiba	tahun									Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										b. Sarpras Pendukung IKP	pengadaan peralatan multimedia	unit									Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik/Jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan dikali 100%	%	39	1.255.414.000	40	1.405.050.000	41	1.845.050.000	41	4.505.514.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota	%	100	1.255.414.000	100	1.405.050.000	100	1.845.050.000	100	4.505.514.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	unit	1500	1.255.414.000	100	1.405.050.000	100	1.845.050.000	100	4.505.514.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

									Terlaksananya belanja sewa jalur internet Metro	Jumlah lokasi penyediaan jalur Metro	Titik	16		16		16		16		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya sewa tower repeater untuk jalur komunikasi	Periode sewa tower repeater	Bulan	12		12		12		12		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT serta jaringan (LAN/FO)	Masa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT serta jaringan (LAN/FO)	Bulan	12		12		12		12		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya belanja jasa Network Analyst	Jumlah tenaga Network Analyst	Orang	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	291.205.000	12	352.205.000	12	720.252.000	12	1.362.662.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya penyusunan dokumen Audit SPBE	Jumlah dokumen Audit SPBE	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya sewa cloud Server Pemkab Karanganyar	Periode sewa cloud Server Pemkab Karanganyar	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang server	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang server	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya pemeliharaan server	Jumlah server yang terpelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Bulan	12	109.525.000	12	135.525.000	12	374.522.000	12	619.572.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya rapat koordinasi data dan informasi elektronik	Periode penyediaan konsumsi rapat koordinasi data dan informasi elektronik	Tahun	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya penyediaan ATK dan perlengkapan cetak	Volume penyediaan ATK dan perlengkapan cetak	Paket	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya belanja jasa Content Analyst dan Media Analyst	Jumlah tenaga Content Analyst dan Media Analyst	Orang	2		2		2		2		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Unit	3	100.000.000	3	130.000.000	3	195.000.000	3	425.000.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

									Terlaksananya pengelolaan sumber daya website Pemkab Karanganyar	Periode pengelolaan sumber daya website Pemkab Karanganyar	Tahun	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya pembuatan sistem Single Sign On (SSO)	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya pengembangan aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah yang dikembangkan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplentasikan sesuai dengan masterplan smart city	dokumen	1	29.430.000	1	35.430.000	1	75.530.000	1	140.390.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung Smart City	Volume pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung Smart City	Paket	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Terlaksananya Study Banding Smart City	Volume Study Banding Smart City	Kali	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	51.250.000	1	51.250.000	1	75.200.000	1	177.700.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan TIK	Periode pemeliharaan peralatan dan perlengkapan TIK	Tahun	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Pengadaan peralatan dan perlengkapan TIK	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan TIK	Paket	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya belanja jasa Produser Multimedia	Jumlah tenaga Produser Multimedia	Orang	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang statistik	Terwujudnya urusan pemerintahan bidang statistik yang valid dan relevan	%	100	125.200.000	100	137.720.000	100	160.492.000	100	423.412.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	100	125.200.000	100	137.720.000	100	160.492.000	100	423.412.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik	Terwujudnya Data yang Valid dan relevan	%	100	125.200.000	100	137.720.000	100	160.492.000	100	423.412.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik	Terwujudnya Data yang Valid dan relevan	%	100	125.200.000	100	137.720.000	100	160.492.000	100	423.412.000	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang persandian		%	63	65.175.000	64	71.692.500	65	171.492.000	65	308.359.500	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	63	65.175.000	64	71.692.500	65	171.492.000	65	308.359.500	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

				2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai perarea keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	63	65.175.000	64	71.692.500	65	171.492.000	65	308.359.500	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya peningkatan keterampilan SDM IT	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan berbasis IT	Orang	6	65.175.000	64	71.692.500	65	171.492.000	65	308.359.500	Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya pelatihan keamanan informasi bagi Tim CSIRT Kabupaten Karanganyar	Jumlah anggota Tim CSIRT yang mengikuti pelatihan keamanan informasi	Orang	50		50		50		50		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
										Terlaksananya belanja sewa SSL (Secure Socket Layer) untuk keamanan Website Kabupaten Karanganyar	Periode sewa SSL	Tahun	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika

										Terlaksananya belanja lisensi Firewall untuk keamanan lalu lintas jaringan internet Pemkab Karanganyar	Masa berlaku lisensi Firewall	Tahun	1		1		1		1		Kabupaten Karanganyar	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------	-------	---	--	---	--	---	--	---	--	--------------------------	--

Kemudian untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar terkait dengan Pelayanan Dasar, Rencana program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- A. Program Informasi dan Komunikasi Publik, difokuskan pada pelayanan informasi public
- B. Program Aplikasi Informatika, difokuskan pada peninbgkatan Smart City

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran atau kegiatan. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Diskominfo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Indikator Kinerja Utama Diskominfo, Tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kabupaten Karanganyar
Mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
(Permendagri 18/ 2020)

No	Indikator sasaran OPD	Definisi Operasional	Satuan	Target			Capaian		Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	DISKOMINFO								
	<i>Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika</i>								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	70	75	80	70	75	80
2.	Indeks SPBE	Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,25	3,37	3,5	2,40	3,32	3,5
	<i>Program urusan penunjang pemerintahan daerah/kota</i>								
3.	Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70	71	72	70,74	70,35	72

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Karanganyar Tahun 2024-2026

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Dinas Komunikasi dan Informatika									
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Indeks SPBE	Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,32	3,50	3,55	3,60	3,70	3,70
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
		Tingkat Keamanan Informasi Publik	Jumlah nilai per area keamanan informasiu di bagi jumlah area	%	62,00	63,00	63,00	64,00	65,00	65,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral di bagi jumlah OPD di kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	70,35	72	72,5	73	73,5	73,5

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK), menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk bisa memaksimalkan kinerja. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memperkirakan target yang akan dicapai. Indikator kinerja ini penting karena untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.3
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Permendagri 18/2020)

No	Indikator sasaran OPD	Definisi Operasional	Satuan	Target			Capaian		Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten dibagi jumlah penduduk x 100%	%	85,71	92,86	100	85,37	100	100
2.	Jumlah KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif	%	76,92	83,33	100	83,30	83,30	100

3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembanguana daerah	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik digabi jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan x 100%	%	60	70	85	60	63	85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dibagi jumlah OPD x 100%							
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dibagi jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
5.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi, dibagi Jumlah area penilaian x 100%	%	61	62	63	61,2	61,2	63

Tabel 7.4
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2024-2026

No		Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Target Capaian			Target			Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten dibagi jumlah penduduk x 100%	%	61,90	73,81	78,57	85,71	92,86	100	100	100	100	100
2.	Jumlah KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif	Jumlah	35,29	59,00	60,86	76,92	83,33	100	25	28	31	31

3.	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik dibagi jumlah aplikasi pemeritah keseluruhan x 100%	%	25	3	35	40	45	50	39	40	41	41
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100%											
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												

1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi, dibagi Jumlah area penilaian x 100%	%	5.0	10	21	20	25	30	63	64	65	65
----	---------------------------------------	--	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Beberapa kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Diskominfo agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan bidang-bidang pada Diskominfo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Diskominfo akan dijabarkan dalam Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Diskominfo wajib berpedoman pada Renstra Diskominfo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Diskominfo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Renstra Diskominfo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Diskominfo Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Renstra dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Pelaksana

Periode Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Renstra tahun 2024-2026, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TTD

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos.,M.Si.



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Fisik dan Prasarana Baperlitbang	
